

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep otonomi daerah telah mengalami perubahan dan perbaikan yang penting seiring berjalannya waktu. Dengan hadirnya perkembangan ini, penting bagi pemerintah pusat untuk lebih fokus pada pertumbuhan masyarakat terutama pada masyarakat di tingkat desa. Pengelolaan pemerintahan yang berjalan dengan baik serta pembangunan desa yang terarah memiliki peran penting dalam mewujudkan harapan masyarakat. Keduanya juga mendorong warga desa untuk lebih terlibat aktif dalam upaya memajukan desa secara bersama-sama. Masyarakat desa pada dasarnya adalah sekelompok orang yang tinggal di lingkungan desa, dan memprioritaskan pemberdayaan mereka dapat mengarah pada kemakmuran nasional dan peningkatan kualitas hidup warganya (Siregar, 2018).

Sebagai unit administratif terkecil di tingkat kabupaten, desa memiliki tugas dan wewenang khusus yang dipandu oleh peraturan yang telah ditetapkan. Agar desa dapat beroperasi secara efektif, desa harus mematuhi peraturan-peraturan ini, dan kepala desa bersama dengan pejabat lainnya bertanggung jawab untuk mengelola administrasinya. Hal ini termasuk menyediakan layanan publik langsung kepada masyarakat. Penyediaan layanan yang berkualitas merupakan hal mendasar dalam memastikan tata kelola pemerintahan atau birokrasi yang efisien. Efektivitas pemerintah desa sangat bergantung pada kualitas layanan ini, karena masyarakat bergantung pada perangkat desa untuk kebutuhan publik seperti pengurusan dokumen dan layanan penting lainnya. Oleh karena itu, perangkat desa memainkan peran penting dalam memberikan layanan-layanan tersebut, yang secara langsung berdampak pada kinerja dan efisiensi perangkat desa. (Rochani et al., 2020).

Di sisi lain, kinerja dalam konteks ini mengacu pada pelaksanaan tugas dengan akuntabilitas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Sinambela (dalam Rochani et al., 2020) mendefinisikan efisiensi kinerja sebagai keahlian pekerja dalam melaksanakan tugas berdasarkan kecakapan yang dimilikinya. Oleh karena itu, kinerja perangkat desa dapat dilihat dengan kapasitas mereka dalam memenuhi tanggung jawab dan menjalankan wewenangnya secara efektif untuk

memenuhi tujuan organisasi. Salah satu fokus utama dari kinerja perangkat desa ialah pengelolaan keuangan desa. Dana desa ialah modal utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Dana ini bersumber dari APBN dan dialokasikan ke desa-desa lewat APBD kabupaten atau kota. Alokasi dana desa mendukung berbagai kegiatan, termasuk tata kelola pemerintahan desa, pengembangan masyarakat, proyek infrastruktur, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Umumnya, desa menerima alokasi anggaran sekitar 10% dari total dana transfer daerah yang langsung disalurkan ke masing-masing desa. Alokasi tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk faktor seperti populasi, luas daerah, angka kemiskinan, dan kondisi geografis (Yanti, 2021).

Mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014, dana desa, setelah dikurangi dana alokasi khusus, harus setidaknya 10% dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dana ini termasuk dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dibagi secara proporsional. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, pemerintah pusat memberikan beberapa sumber daya keuangan kepada pemerintah kabupaten untuk digunakan dalam program penataan dana desa. Pemerintah desa, terutama aparaturnya, harus mengutamakan keadilan dan mencapai tujuan saat mengelola dana itu. Untuk memastikan penataan dana desa berhasil, kolaborasi yang efektif antara aparat desa dan anggota masyarakat sangat penting (Rochani et al., 2020).

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa di Provinsi Jawa Barat tahun 2023, terdapat 2.355 desa maju, 2.448 desa mandiri, dan 508 desa berkembang. IDM sendiri merupakan indikator kompleks yang digunakan untuk menilai pembangunan desa di empat dimensi utama: infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan menggabungkan skor dari berbagai sub-indikator, IDM memberikan evaluasi komprehensif yang membantu mengidentifikasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memandu alokasi sumber daya secara lebih tepat sasaran. Desa Neglasari di Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Pakenjeng, kini termasuk desa yang berstatus maju.

Karena tergolong desa maju, Desa Neglasari mendapatkan distribusi dana desa yang berbeda dari desa lainnya. Target utama dari dana desa ialah untuk

mempercepat kontruksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp6,19 triliun untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, dengan Kabupaten Garut menerima alokasi kedua terbesar sebesar Rp487,7 miliar. Dana ini kemudian didistribusikan kepada 421 desa di Garut, termasuk Desa Neglasari, yang memperoleh pendapatan sebesar Rp2.100.830.000. Dengan alokasi dana yang cukup besar, penting untuk meneliti sejauh mana penataan dana desa ini telah dijalankan secara efektif oleh perangkat desa dan bagaimana dampaknya terhadap kepuasan masyarakat

Berikut ini ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neglasari Tahun 2024 yang ditampilkan pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neglasari Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	
1.1	Pendapatan Asli Desa	10.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	2.090.830.000
1.3	Pendapatan Lain-Lain	0
Jumlah Pendapatan		2.100.830.000
2	Belanja Desa	
2.1	Bidang Pemerintahan	760.902.046
2.2	Bidang Pembangunan	
	- Sub Bidang Pendidikan	20.0000.000
	- Sub Bidang Kesehatan	121.908.000
	- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	790.000.000
	Total Bidang Pembangunan	931.908.000
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan	7.766.000
2.4	Pemberdayaan Masyarakat	140.000.000
2.5	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	230.000.000
3	Pembiayaan	
3.1	SILPA Tahun Sebelumnya	5.253.954
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000

Jumlah Belanja	2.100.830.000
-----------------------	----------------------

Sumber: APBDes Desa Neglasari (2024)

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat Desa Neglasari masuk dalam kategori desa maju menurut IDM, sehingga diharapkan mampu mengelola dana desa secara lebih optimal. Studi ini bermaksud untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat pada pengelolaan dana desa, serta menguji pengaruh efektivitas kinerja perangkat desa saat mengelola APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) terhadap kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan dana desa karena mencerminkan seberapa baik pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat desa.

Kantor Desa Neglasari menghadapi sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prosedur yang diterapkan dinilai terlalu berbelit karena pola birokrasi yang masih kaku, sehingga memperlambat proses pelayanan. Selain itu, terdapat indikasi perilaku tidak etis dari sebagian oknum yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Sikap aparaturnya yang kurang ramah dan tidak komunikatif juga memperburuk pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan. Ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan menyebabkan banyak layanan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Di samping itu, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa turut menjadi sorotan, karena hal ini berdampak langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kelurahan.

Penelitian ini berfokus pada kepuasan masyarakat sebagai faktor penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Desa Neglasari. Kepuasan masyarakat yang tinggi dapat memperbaiki kualitas hidup dan memberikan informasi penting untuk meningkatkan kebijakan yang masih kurang efektif. Penelitian sebelumnya oleh Rochani dkk. (2020) menandakan jika efisiensi perangkat desa yang baik dan penataan dana desa yang tepat dapat meningkatkan kepuasan masyarakat secara signifikan. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan masyarakat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kepercayaan publik. Demikian pula, Yanti (2021) menemukan bahwa distribusi dana desa yang efisien memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan

masyarakat. Pada penelitian Fitri (2015) juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dalam mengelola alokasi dana desa menjadi kunci penting terhadap kepuasan masyarakat dan kemajuan suatu desa.

Penelitian ini ini bermaksud untuk menilai **“Pengaruh Kinerja Aparatur Desa dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Neglasari Kabupaten Garut”**. Diharapkan, temuan studi ini bisa menjabarkan seberapa besar pengaruh dari kinerja perangkat desa dan penataan APBDes pada kepuasan masyarakat di desa yang sudah berkembang.

B. Perumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dibahas, fokus utama penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan dibawah ini:

1. Apakah kinerja aparatur desa memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Desa Neglasari?
2. Apakah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Neglasari memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat Desa Neglasari?
3. Apakah terdapat pengaruh antara kinerja aparatur desa dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap kepuasan masyarakat di Desa Neglasari?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada penjabaran latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka arah dari penelitian ini difokuskan pada beberapa tujuan, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparatur desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di Desa Neglasari.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di Desa Neglasari.

3. Untuk mengetahui secara menyeluruh kinerja aparatur desa dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di Desa Neglasari

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Diharapkan temuan dalam penelitian ini tidak hanya berguna secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Aspek Teoritis
 - a. Diharapkan studi bisa memberikan wawasan baru di bidang administrasi publik, dengan mengkaji bagaimana kinerja perangkat desa dan penataan APBDes memengaruhi kepuasan masyarakat.
 - b. Diharapkan studi ini bisa menjadi sumber referensi bagi studi selanjutnya yang ingin mendalami topik tentang administrasi publik, tata kelola pemerintahan, dan pengaruh antara kinerja perangkat desa, penataan APBDes, serta kepuasan masyarakat.
2. Aspek Praktis
 - a. Studi ini akan memberikan peneliti wawasan lebih dalam serta pengalaman langsung tentang dampak pengelolaan APBDes dan kinerja perangkat desa pada kepuasan masyarakat di Desa Neglasari. Di samping itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada penyelesaian tugas akhir program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk memenuhi syarat gelar S.AP.
 - b. Bagi aparatur desa, hasil studi ini bisa dipakai untuk dasar untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perangkat desa dan efektivitas strategi penataan dana desa.
 - c. Bagi mahasiswa, studi ini memberikan keterangan dan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan masyarakat yang dapat berguna untuk kepentingan akademis.

E. Kerangka Pemikiran

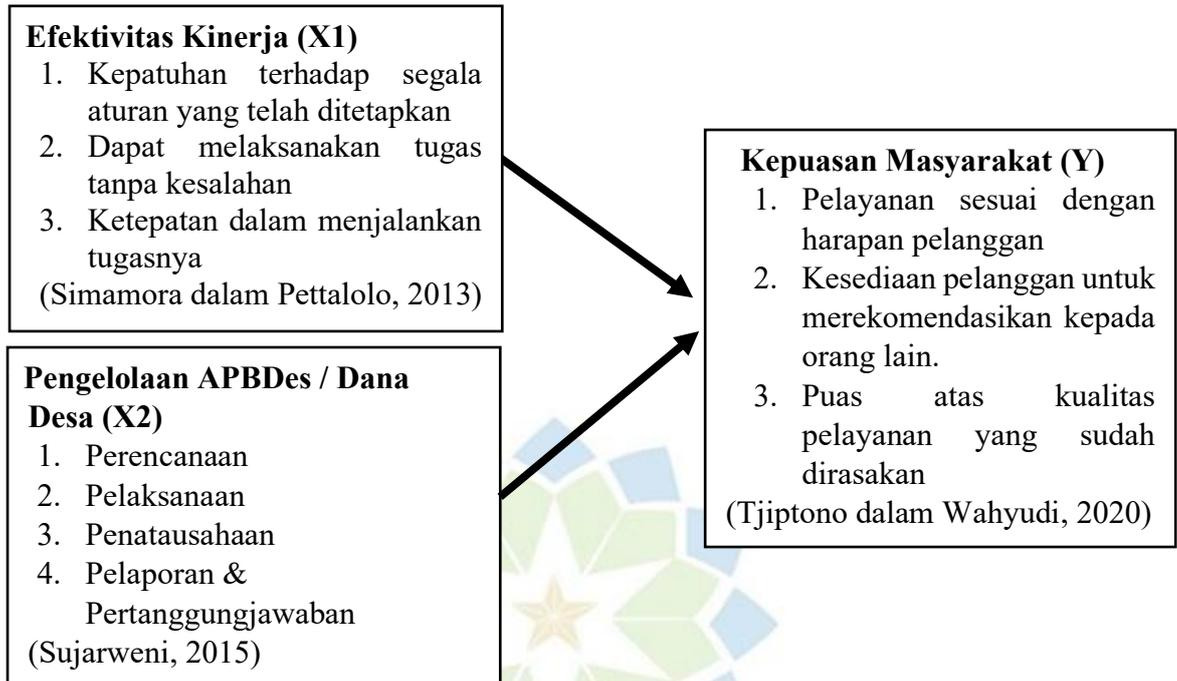
Studi ini bermaksud untuk mengkaji sejauh mana pengaruh kinerja aparatur desa serta pengelolaan APBDes berkontribusi terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Desa Neglasari. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari tiga konsep yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*.

Penelitian ini berlandaskan pada teori utama yaitu Administrasi Publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Pasolong (2019), administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu proses kerja sama antar individu maupun organisasi yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara optimal, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, *middle theory* yang menjadi dasar analisis adalah konsep mengenai pelayanan publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Sinambela (2011) pelayanan publik meliputi setiap kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau kepuasan kepada masyarakat, meskipun hasilnya tidak berwujud suatu produk.

Sedangkan *Applied theory* dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator efektivitas kinerja menurut Simamora dalam Pettalolo (2013) untuk variabel X1, indikator pengelolaan dana desa menurut Sujarweni (2015) untuk variabel X2, dan indikator kepuasan masyarakat menurut Tjiptono dalam Wahyudi (2020).

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti (2024)

F. Hipotesis

Hipotesis dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai dugaan awal yang disusun berdasarkan data atau informasi yang masih terbatas. Pernyataan ini nantinya akan diuji kebenarannya melalui proses penelitian lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini, hipotesis disusun dengan mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang ingin dicapai. Adapun hipotesis yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Hipotesis 1:

Ha: Terdapat dugaan bahwa kualitas kinerja aparat desa memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Desa Neglasari.

H0: Terdapat dugaan bahwa kualitas kinerja aparat desa tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Desa Neglasari.

2. Hipotesis 2:

Ha: Terdapat dugaan bahwa pengelolaan APBDes turut memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat di Desa Neglasari.

H0: Terdapat dugaan bahwa pengelolaan APBDes tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Desa Neglasari.

3. Hipotesis 3:

Ha: Terdapat dugaan bahwa kombinasi antara kinerja aparatur desa dan pengelolaan APBDes secara bersamaan (simultan) dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan masyarakat di Desa Neglasari.

H0: Terdapat dugaan bahwa secara simultan, kinerja aparatur desa dan pengelolaan APBDes tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Neglasari.

